

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Identitas Tiongkok sebagai aliansi Korea Utara tercermin di dalam hubungan bilateralnya. Salah satunya, kedua negara tersebut memiliki perjanjian bilateral yang dinamakan dengan *'The Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance'* perjanjian ini merupakan perjanjian kerja sama militer pada masa perang dingin yaitu tahun 1961. Terkait perjanjian tersebut, keduanya memiliki kewajiban untuk saling melindungi satu sama lain jika terjadi adanya agresi militer pada saat itu (Nam, 2010, hal. 13). Tidak hanya dalam bidang militer, kedua negara tersebut juga memiliki kerja sama di bidang lainya seperti ekonomi. Seorang peneliti asal Tiongkok memperkirakan 90% kebutuhan ekonomi Korea Utara berasal dari Tiongkok melalui kerja sama ekspor dan impor serta bantuan ekonomi yang di berikan oleh Tiongkok (Jiang, 2019, hal. 1-4).¹ Hubungan di antara kedua negara yang telah terjalin cukup lama ini telah terkonstruksi dengan baik sehingga interaksi – interaksi yang terjalin sebagai mana yang telah dijelaskan di atas bahwa kedua negara tersebut telah saling mengidentifikasi satu sama lain sebagai aliansi.

Sementara itu, DK-PBB telah menetapkan resolusinya untuk mengenakan sanksi ekonomi kepada Korea Utara. Sanksi ekonomi ini digunakan untuk menekan pengembangan senjata rudal nuklirnya dan adanya denuklirisasi di Korea Utara.

¹ Jiang, Y. (2019). *Sanctions Are An Important Tool In China's North Korea Diplomacy*. Danish Institute for International Studies Policy Brief,

Penetapan sanksi DK-PBB ini bermula pada tahun 2006 sebagai bentuk respons terhadap uji coba nuklir pertama Korea Utara. Dalam hal ini, DK-PBB mengeluarkan resolusi nomor 1718 yang berisikan mengenai pelarangan negara anggota PBB untuk melakukan ekspor – impor dengan Korea Utara yang berkaitan dengan barang – barang pengembangan nuklir (UN, 2006). Sikap Tiongkok mengenai penetapan sanksi DK-PBB pada saat itu dinilai tidak kooperatif. Walaupun Tiongkok mendukung adanya penetapan resolusi DK-PBB ini, Tiongkok justru menolak dilakukan pemeriksaan mengenai kargo yang datang ataupun dikirim ke Korea Utara (UNSCR, 2006).² Dari hal tersebut masih adanya keberpihakan Tiongkok kepada Korea Utara.

Sikap kooperatif pemerintah Tiongkok dalam penetapan sanksi ekonomi kepada Korea Utara di mulai pada tahun 2013. Pada saat itu, pemerintah Tiongkok merupakan salah satu negara yang berperan aktif dalam penyusunan resolusi DK-PBB nomor 2094 sebagai respons dari tindakan uji coba rudal nuklir Korea Utara ke tiga (UNSCR, 2013).³ Dalam implementasinya pemerintah Tiongkok telah menutup ekspor ke Korea Utara mengenai bahan-bahan yang di indikasikan sebagai bahan yang digunakan untuk mengembangkan senjata nuklir di Korea Utara (New

² *Security Council Condemns Nuclear Test by Democratic People's Republic of Korea.* (2006) *United Nations Press Release.* Dalam <https://www.un.org/press/en/2006/sc8853.doc.htm> . Diunduh pada 19 Januari 2020.

³ *Resolution 2094: Non-proliferation/Democratic People's Republic of Korea.* (2013). *United Nations Security Council:* Dalam http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2094.pdf. Diunduh pada 7 Maret 2020.

York Times, 2013).⁴ Dilanjut pada pertengahan tahun 2014, pemerintah Tiongkok menutup ekspor mengenai bahan bakar minyak kepada Korea Utara.⁵

Sikap dukungan pemerintah Tiongkok terhadap penetapan sanksi ekonomi DK-PBB kepada Korea Utara berlanjut pada tahun 2017. Pada tahun 2017, DK-PBB telah menetapkan pengenaan sanksi paling berat dalam sejarah kepada Korea Utara. Sanksi tersebut di antara lain berisikan mengenai pelarangan impor sebesar 89 dari jumlah ekspor semula dan juga melarang ekspor baja, besi serta makanan laut yang di indikasi sebagai pemasukan utama Korea Utara untuk mengembangkan senjata nuklirnya (UNSCR, 2017). Mengenai hal ini, pemerintah Tiongkok justru menyatakan dukungannya langsung melalui presiden Xi Jinping. Presiden Xi Jinping sendiri menyarankan akan memberikan larangan impor produk – produk asal Korea Utara seperti batu bara, biji besi, besi, timbal serta produk makanan laut sebagai dukungan pemerintah Tiongkok dalam merealisasikan resolusi DK-PBB tersebut (The Diplomat, 2017).

Seharusnya, Tiongkok sebagai aliansi membantu Korea Utara dengan melakukan penolakan terhadap sanksi ekonomi DK-PBB tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan pemerintah Tiongkok dengan menggunakan hak vetonya untuk tidak mendukung adanya sanksi ekonomi tersebut. Tetapi, pemerintah Tiongkok lebih memilih mendukung penetapan sanksi tersebut. Merujuk dari hal tersebut,

⁴ China Bans Items for Export to North Korea, Fearing Their Use in Weapons. (2013). Dalam New York Times: <https://www.nytimes.com/2013/09/25/world/asia/china-bans-certain-north-korean-exports-for-fear-of-weapons-use.html>. Di unduh pada 24 September 2020 pukul 13.00.

⁵ *Op.cit.*, *lih (1)*. Hal. 6

penulis mengajukan pertanyaan: mengapa Tiongkok mendukung penetapan sanksi ekonomi yang ditetapkan oleh DK-PBB kepada Korea Utara tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini akan berfokus pada analisis perubahan kebijakan luar negeri Tiongkok kepada Korea Utara yang mendukung penetapan sanksi ekonomi Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) pada tahun 2013 hingga tahun 2018. Penelitian ini akan bersifat eksplanatif dengan menjelaskan alasan mengapa Tiongkok mendukung penetapan sanksi ekonomi yang dikenakan oleh DK-PBB kepada Korea Utara yang dapat berdampak kepada kerugian dalam pertumbuhan negara aliansinya tersebut. Penelitian ini juga ditujukan untuk memberikan pandangan lain dan pemahaman secara mendalam mengenai kebijakan luar negeri Tiongkok dalam mendukung penetapan sanksi ekonomi kepada Korea Utara. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada perkembangan ilmu pengetahuan hubungan internasional dan juga dapat dijadikan peran bagi pemerintah Indonesia untuk mengembangkan *soft power* diplomasi negara khususnya dalam mempromosikan budaya, nilai-nilai, adat istiadat, maupun norma dalam negeri Indonesia di kancah komunitas internasional.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pembahasan yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian, dapat ditarik sebuah rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yakni: “Mengapa pemerintah Tiongkok mendukung penetapan sanksi ekonomi DK-PBB kepada Korea Utara dalam isu denuklirisasi?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini secara khusus untuk menjawab rumusan masalah yang muncul pada penelitian ini. Lalu, tujuan dari penelitian ini secara umum untuk menjelaskan pengaruh perubahan kebijakan luar negeri Tiongkok kepada Korea Utara sebagai negara aliansinya dalam isu denuklirisasi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan ilmu hubungan internasional mengenai perubahan kebijakan luar negeri Tiongkok dan juga diharapkan dapat memberikan pandangan melalui sudut pandang yang berbeda dalam menganalisis fenomena hubungan internasional. Secara praktis, penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi pemerintah Indonesia dalam mengembangkan politik luar negerinya melalui budaya, nilai-nilai, maupun norma dalam negeri Indonesia.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Topik dari penelitian ini sebelumnya telah di teliti oleh beberapa peneliti seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Joo Young Song yang berjudul '*Understanding China's Respons to North Korea's Provocations: The Dual Threats Model*'. Penelitian tersebut menjelaskan secara deskriptif bagaimana Tiongkok merespons Korea Utara dalam uji coba nuklirnya dengan menggunakan metode analisa *Dual Threat Model* sehingga dapat diketahui pola-pola yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok dalam kebijakan luar negerinya terkait isu tersebut. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwasanya Tiongkok melalui perubahan kebijakan luar negerinya dianggap merasa terancam khususnya secara pertahanan dan keamanan

regional wilayah negaranya dengan tindakan yang dilakukan oleh Korea Utara yakni mengembangkan persenjataan rudal nuklirnya (Song, 2011, hal. 1154). Dalam hal ini penelitian ini hanya melihat faktor eksternal yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Tiongkok sehingga penelitian ini belum menjelaskan mengenai faktor internal Tiongkok yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negerinya terkait isu tersebut.

Lalu terdapat penelitian yang telah dilakukan oleh Bruce W. Bennett dengan judul *'Implications of China's Economic Penetration of North Korea?'*. Di dalam penelitian tersebut, Bruce menjelaskan mengenai bagaimana pengaruh pemerintah Tiongkok terhadap Korea Utara dengan mengimplikasikan resolusi DK-PBB yang telah ditetapkan untuk mendukung terciptanya denuklirisasi di Korea Utara. Dalam ini, penelitian tersebut menjelaskan mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok dalam mengimplementasikan dan merealisasikan resolusi DK-PBB (Bennett, 2016, hal. 275). Namun, penelitian ini secara khusus tidak menjelaskan mengenai alasan mengapa pemerintah Tiongkok mendukung penetapan sanksi ekonomi resolusi DK-PBB terhadap Korea Utara tersebut.

Kemudian penelitian yang telah dilakukan oleh Victoria-Charlotte Browning dan Dr. Stefan Friedrich yang berjudul *'The United Nations and North Korea: A Balancing Act Between Sanction and Humanitarian Assistance'*. Di dalam penelitian tersebut Browning dan Friedrich menjelaskan mengenai keefektifan sanksi ekonomi yang ditetapkan oleh DK-PBB kepada Korea Utara dalam merespons uji rudal nuklirnya. Browning dan Friedrich juga berpendapat bahwa

Tiongkok dan Rusia memiliki peran penting dalam menunjang keefektifan sanksi ekonomi tersebut (Browning dan Friedrich, 2017, hal. 10-11). Dalam hal ini, penelitian tersebut hanya menjelaskan bagaimana kinerja sanksi ekonomi yang telah dilakukan oleh DK-PB terkait isu tersebut termasuk Tiongkok sehingga penelitian ini belum dapat menjelaskan mengenai penyebab dari perubahan sikap Tiongkok sebagai negara aliansi Korea Utara dengan mengimplementasikan sanksi ekonomi tersebut.

Dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini akan memfokuskan pada faktor internal yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Tiongkok kepada Korea Utara dalam isu denuklirisasi. Maka dari itu penelitian ini akan menggunakan teori hubungan internasional yakni konstruktivisme di mana konstruktivisme percaya bahwa faktor-faktor ideasional atau normatif seperti budaya, norma, kepercayaan, bahasa, gagasan dan faktor non-materil lainnya merupakan hal yang penting dalam pembentukan struktur sosial (Burchill, 2005, hal. 196).⁶ Hal tersebutlah yang membedakan konstruktivisme dengan teori-teori hubungan internasional lainnya seperti Realisme dan Liberalisme. Di mana seperti yang dijelaskan oleh Morgenthau (1973:108) bahwa realisme percaya *'The actions of states are determined not by moral principles and legal commitments but by considerations of interest and power'*. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwasanya realisme tidak

⁶ Burchill, Scott A. dan kawan-kawan. (2005). *Theories of International Relations* (hal. 188-211). New York: Palgrave Macmillan.

percaya adanya pengaruh moral atau norma maupun hal-hal ideasional lainnya dalam tindakan suatu aktor. Sedangkan liberalisme percaya bahwa perdamaian dapat tercipta ketika setiap negara memiliki hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain (interdependensi).⁷ Jika dikaitkan dengan topik penelitian, liberalisme hanya dapat menjelaskan faktor eksternal mengenai pengaruh perubahan kebijakan luar negeri Tiongkok terhadap Korea Utara dalam isu denuklirisasi. Maka dari itu, penelitian ini akan menggunakan pendekatan konstruktivisme sebagai kerangka teoritis yang digunakan untuk menjelaskan untuk menjelaskan perubahan kebijakan luar negeri Tiongkok terhadap Korea Utara dalam isu denuklirisasi dengan mengidentifikasi norma ataupun nilai ajaran budaya dari negara Tiongkok.

Norma sendiri di definisikan sebagai '*collective expectation for the proper behavior of actors with a given identity*' (Katzenstein, 1996, hal. 3). Dalam hal ini norma dapat diartikan sebagai suatu persepsi aktor dalam melakukan suatu tindakan dengan identitas yang dimiliki oleh aktor tersebut. Sifat norma sendiri menyediakan suatu kerangka mengenai apa yang harus dilakukan dan tidak perlu dilakukan oleh suatu aktor sehingga dapat disimpulkan norma sendiri memiliki sifat yang regulatif dalam menentukan standar perilaku suatu aktor melalui identitas yang dimilikinya.

Salah satu norma yang dimiliki oleh negara Tiongkok yakni norma Konfusianisme. Konfusianisme sendiri merupakan suatu ajaran filsafat budaya kuno Tiongkok yang dikemukakan oleh Kongzi dan dikembangkan oleh Mencius

⁷*Ibid. hal. 89*

(murid Kongzi) pada tahun 220 hingga 260 SM pada masa kekaisaran dinasti Han (McArthur, 2011, hal. 47).⁸ Konfusianisme sendiri mengajarkan mengenai etika dan moral suatu aktor dalam melakukan suatu tindakan. Hal tersebut terbagi menjadi dua, yakni *个人利益* (kepentingan pribadi) dan *共同利益* (kepentingan bersama) (Wang dan Madson, 2013, hal. 28).⁹ Dalam hal dapat dikatakan suatu aktor memiliki kepentingan dalam melakukan tindakannya. Konfusianisme sebagai norma yang memiliki sifat regulatif memberikan standar bagaimana suatu aktor tersebut dapat bertindak. Hal ini dapat dilihat dari lima nilai utama Konfusianisme di antaranya *ren* (仁) yang diartikan sebagai kemanusiaan, *yi* (义) yang diartikan sebagai kebajikan atau keadilan, *li* (理) yang diartikan sebagai tata cara atau aturan seseorang untuk bertindak. Dalam hal seseorang harus patuh kepada aturan yang ada yang berlandaskan etika dan moral, *zhi* (智) yang diartikan sebagai kebijaksanaan dan *xin* (信) yang diartikan sebagai integritas. Di mana nilai-nilai tersebut akan membentuk suatu aktor yang dianggap sebagai *nobleman/Junzi* yang diartikan bahwa aktor tersebut merupakan “seseorang yang ideal” (McArthur, 2011, hal. 165; Wang dan Madson, 2013, hal. 28). Konfusianisme juga percaya bahwa tatanan sosial yang ideal ketika *‘the world share in common by all’* yang dapat diartikan bahwa tatanan sosial yang ideal ketika setiap manusia memiliki nasib yang sama untuk memiliki kehidupan yang damai hal ini memiliki sifat yang di istilahkan

⁸ McArthur, M. (2011). *Confucianism*. Quercus.

⁹ Wang, C., & Madson, N. H. (2013). *Philosophical underpinnings of the Chinese legal system*. System. Cambridge: Chandos Publishing.

sebagai *all-under-heaven* (*tian xia wei gong*) yang dapat diartikan bahwasannya kehidupan yang damai merupakan tanggung jawab setiap manusia. Hal tersebut dikatakan oleh Konfusius sebagai *mandate from heaven* atau dapat diartikan bahwasannya tanggung jawab tersebut berasal dari ilahi sehingga esensi dari segalanya adalah untuk mengejar suatu kehidupan yang 'harmoni' (*Da Tong*) seraya mengejar kepentingan-kepentingan lainnya (Bell D. A., 2010, hal. 40-41).¹⁰

Dengan demikian, perubahan kebijakan luar negeri Tiongkok kepada Korea Utara dalam isu denuklirisasi dapat dipandang melalui norma Konfusianisme yang merupakan norma negara Tiongkok bahwasanya norma Konfusianisme yang mengedepankan *harmoni* atau perdamaian dunia di mana hal tersebut mempengaruhi pembentukan identitas Tiongkok yang terimplementasikan ke dalam suatu tindakan pemerintah Tiongkok dengan mengubah kebijakan luar negerinya terhadap Korea Utara khususnya dalam isu denuklirisasi.

1.6 Operasionalisasi Konsep

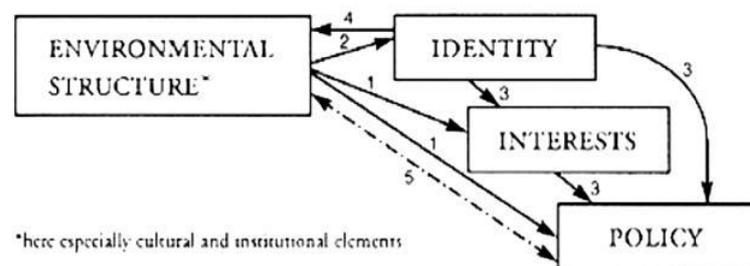
1.6.1 Konstruktivisme (Norm Concept)

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Konstruktivisme percaya bahwa faktor-faktor ideasional atau normatif seperti budaya, norma, kepercayaan, bahasa, gagasan dan faktor non-materil lainnya merupakan hal yang penting dalam pembentukan struktur sosial.¹¹ Secara ontologis, konstruktivisme memiliki tiga

¹⁰ Bell, D. A. (2010). *China's New Confucism: Politics and Everyday Life in a Changing Society*. New Jersey: Princeton University Press.

¹¹ *Op.cit. lih* (6). Hal. 196

preposisi dalam menjelaskan pembentukan struktur kehidupan sosial. Hal tersebut dijelaskan di antaranya, yang pertama yakni bahwa aspek ideasional atau struktur normatif dianggap sebagai suatu hal yang penting dalam pembentukan struktur sosial. Yang kedua, struktur ideasional (non-materil) dianggap dapat mempengaruhi pembentukan identitas suatu aktor yang kemudian identitas tersebut akan membentuk suatu kepentingan dan kepentingan tersebut akan terealisasi dengan suatu tindakan suatu aktor. Yang ketiga, struktur dan agen (aktor) memiliki hubungan saling berkaitan satu sama lain (*mutually constituted*).¹² Berikut merupakan gambaran operasional mengenai pembentukan struktur dalam teori konstruktivisme:



Gambar 1.1 Gambaran Operasional Konstruktivisme

Sumber: (Jepperson, Wendt, dan Katzenstein, 1996, hal. 53)

Dari gambar di atas dapat diketahui terdapat lima pola hubungan di antara norma, identitas, kepentingan dan kebijakan (tindakan suatu negara). Yang pertama (No.1), suatu struktur normatif atau norma akan membentuk kepentingan ataupun langsung membentuk suatu kebijakan. Yang kedua (No.2), norma akan membentuk

¹² *Op.cit.*, lih (6). Hal 196

suatu identitas aktor. Yang ketiga (No.3), identitas akan membentuk kepentingan lalu akan mempengaruhi kebijakan atau identitas secara langsung dapat mempengaruhi kebijakan. Yang keempat (No.4), suatu identitas akan membentuk norma. Lalu yang terakhir (No.5), norma dan kebijakan memiliki hubungan yang saling berkaitan. Dalam hal ini norma akan membentuk kebijakan, lalu kebijakan ini dapat mempengaruhi norma tersebut (mengubah atau memperkuat) (Rosyidin, 2012, hal. 139)¹³.

1.6.2 Konfusianisme Tiongkok

Di dalam kebijakan luar negeri Tiongkok, pengaruh Konfusianisme dapat dilihat melalui empat elemen penting dalam pembentukan kebijakan luar negerinya. Hal tersebut dijelaskan oleh Qin Yaqing (2012) di antaranya *contextuality*, *correlativity complementarity*, dan *changeability* yang akan di jabarkan sebagai berikut:

1. *Contextuality* merupakan penyesuaian diri dengan lingkungan. *Contextuality* merupakan konsep dari nilai *shi*. Yang diartikan bahwa kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh kekuasaan yang berada di lingkungan internasional.
2. *Correlativity* di dalam suatu kebijakan luar negeri dapat memiliki makna untuk mencari harga diri atau mendapatkan pengakuan dari negara lain (*mianzi*). Hal ini merupakan suatu hubungan timbal balik dari tindakan

¹³ Rosyidin, M. (2012). *Mengapa tidak berperang? Norma Politik Luar Negeri Cina dan Konflik Laut Cina Selatan*. Andalas Journal of International Studies,.

yang dilakukan oleh aktor melalui hubungan kerja sama multilateral maupun bilateral (*gianxi*).

3. *Complementarity* diartikan sebagai saling melengkapi satu sama lain (*yiching*) konsep ini merupakan cerminan dari simbol *yin-yang*. Hal ini juga dapat diartikan bahwa setiap negara memiliki peran yang penting dan setiap halnya memiliki sifat saling melengkapi satu sama lain. Dalam kehidupan sosial dapat diartikan juga bahwa aktor mengakui adanya konflik dan harmoni (*he*). Dalam hal ini harmoni akan tercipta ketika adanya konflik dan konflik tersebut akan terselesaikan jika rasa saling melengkapi satu sama lain dapat tercipta.
4. *Changeability* dapat diartikan kebijakan luar negeri Tiongkok akan mengalami perubahan secara terus menerus (*bian*)

Konfusianisme juga memandang komunitas internasional seperti '*agora without polis or a talking shop without a teeth*' dalam artian komunitas atau norma internasional memerlukan justifikasi dari setiap anggotanya (Babones, 2016). Justifikasi tersebut dapat dikatakan sebagai suatu komitmen negara (aktor) dalam melakukan tindakan dengan mengimplementasikan keputusan dari komunitas internasional maupun norma-norma internasional lainnya. Dalam hal ini dapat dikatakan suatu patuh terhadap aturan yang telah disepakatinya.

Terlebih dari penjelasan di atas, inti ataupun esensi dari ajaran konfusianisme dalam kehidupan sosial maupun politik adalah untuk mencapai suatu *harmoni besar (Da Tong)*. *Harmoni besar (Da Tong)* akan tercipta ketika tatanan sosial bersifat ideal. Tatanan sosial yang ideal akan tercipta ketika '*the world shared*

in common by all' atau diartikan ketika setiap manusia memiliki rasa kebersamaan satu sama lain. Dalam hal ini konfusianisme percaya bahwa setiap manusia memiliki nasib yang sama untuk memiliki kehidupan yang damai namun tidak melupakan kepentingan-kepentingan lainnya.¹⁴ Dari hal tersebut dapat diartikan bahwa tujuan akhir dari segala praktik politik adalah untuk menciptakan *harmoni* dalam hal ini stabilitas keamanan dan perdamaian dunia seraya mengejar kepentingan lainnya.

1.7 Argumen Penelitian

Argumentasi utama dari penelitian ini yakni bahwasanya perubahan kebijakan luar negeri Tiongkok terhadap Korea Utara dalam isu denuklirisasi di sebabkan oleh nilai-nilai dari norma filsafat konfusianisme dalam hal ini norma konfusianisme mempengaruhi basis pembentukan identitas Tiongkok sebagai negara yang cinta akan perdamaian. Reputasi citra Tiongkok sebagai negara yang cinta akan perdamaian ini akan menjadi alat yang dapat digunakan sebagai *bargaining position* Tiongkok dalam kancah politik internasional. Selain itu, identitas Tiongkok tersebut pula menjadikan pemerintah Tiongkok memiliki tanggung jawab untuk menciptakan stabilitas keamanan dan perdamaian di wilayah regional maupun dunia. Dalam hal ini tanggung jawab tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu kepentingan pemerintah Tiongkok itu sendiri. Sehingga, dapat dikatakan bahwa yang melatarbelakangi terjadinya perubahan perilaku Tiongkok

¹⁴ *Op.cit.*, lih (10). Hal. 40-41

terhadap Korea Utara dalam isu denuklirisasi adalah nilai dari norma Konfusianisme yang berasal dari dalam negeri Tiongkok itu sendiri.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Di mana metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menjelaskan mengenai hubungan di antara dua variabel atau lebih dalam menganalisis suatu kasus atau fenomena pada penelitian (Mas'ood, 1990, hal. 95).

1.8.1 Tipe penelitian

Tipe penelitian ini bersifat kualitatif eksplanatif dengan paradigma interpretif. Tipe penelitian kualitatif eksplanatif dapat diartikan sebagai penelitian yang digunakan untuk menjelaskan kontradiksi dalam suatu fenomena di antara variabel dependen dan variabel independen (Neuman, 2014. Hal. 479-380).¹⁵ Sedangkan paradigma interpretif merupakan suatu paradigma penelitian yang digunakan untuk memahami subjek penelitian terhadap tindakan yang dilakukannya sehingga akan ditemui konstruksi serta makna dari tindakan subjek penelitian tersebut.¹⁶ Dalam hal ini penelitian ini akan mencoba menjelaskan konstruksi dari tindakan luar negeri Tiongkok terhadap Korea Utara yang dianggap kontradiksi dengan identitas negara aliansinya dalam isu denuklirisasi.

¹⁵ Neuman, W. Lawrence. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Edinburgh: Pearson.

¹⁶ *Ibid. hal. 103*

1.8.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian pada penelitian yakni pemerintah Tiongkok yang dimulai pada tahun 2013 hingga 2018 yang dipimpin oleh presiden Xi Jinping.

1.8.3 Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini berupa teks, kata-kata tertulis maupun frasa-frasa.

1.8.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini merupakan sumber data sekunder di mana sumber data sekunder merupakan sumber data yang bersifat tidak langsung.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi Pustaka di mana teknik tersebut digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang dapat berupa, *website*, buku-buku, laporan, artikel, jurnal dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

1.8.6 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam penelitian kualitatif terdapat tiga langkah (*coding*) yang dilakukan dalam melakukan analisis dan interpretasi data seperti yang dijelaskan oleh Neuman (2014:480-484), di antaranya:

1. *Open Coding*: pemfokusan pencarian data penelitian. Dalam hal ini peneliti menentukan variabel dependen dan independen sehingga dapat difokuskan ke dalam kategori data yang memiliki kesinambungan dengan topik penelitian. Dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan atas fenomena yang terjadi dalam pembahasan topik penelitian.
2. *Axial Coding*: penyusunan data yang diperoleh. Dalam hal ini, peneliti akan menjabarkan konsep pendahuluan yang menjelaskan mengenai kondisi serta sebab-akibat dalam fenomena penelitian.
3. *Selective Coding*: penyusunan penelitian di mana ketika konsep penelitian terbangun dengan baik dan penelitian tersebut di analisis dengan menggunakan teori yang telah di tentukan dalam penelitian ini.¹⁷

Dalam menganalisis dan menginterpretasikan data, penelitian ini menggunakan metode analisis kongruen. Di mana metode analisis kongruen merupakan metode analisis yang digunakan peneliti untuk membuktikan suatu teori pada fenomena atau kasus penelitian sehingga dapat diketahui mengenai penjelasan atau prediksi dari hasil penelitian (George dan Bennett, 2005, hal. 226).¹⁸ Di dalam metode analisis kongruen terdapat langkah-langkah dalam menginterpretasikan data. Di antaranya yang pertama adalah menentukan variabel independen dalam suatu kasus, yang kedua hipotesis atau prediksi hasil penelitian digunakan sebagai variabel dependen penelitian. Dalam hal ini, variabel dependen penelitian di dasari

¹⁷ *Ibid.* hal. 480-484

¹⁸ George, A. L., & Bennett, A. (2005). *The Congruence Method*. Dalam George, A. L., & Bennett, A. *Case Studies And Theory Development in the Social Sciences*. London: MIT Press.

atas teori yang digunakan dalam penelitian ini. Jika hipotesis tersebut terbukti kebenarannya maka dapat dikatakan kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang kausal di dalam fenomena penelitian tersebut.¹⁹

1.8.7 *Kualitas Data (goodness criteria)*

Kualitas data atau *goodness criteria* dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis *reliability* dan *validity*. *Reliability* dapat didefinisikan sebagai konsistensi data yang diperoleh. Dalam hal ini, data yang diperoleh di analisis dengan melihat konsistensi dari upaya pemerintah Tiongkok dari tahun 2013 hingga 2018 yang menerapkan sanksi ekonomi DK-PBB terhadap Korea Utara sebagai upaya dari perwujudan denuklirisasi. Sedangkan, *validity* dapat di definisikan *truthfulness* atau keadaan yang sebenarnya. Dalam hal data yang diperoleh dianalisis melalui kredibilitas dan otentisitas dari realitas yang dihayati oleh aktor (subjek penelitian).²⁰

¹⁹ *Ibid. hal. 226*

²⁰ *Op.cit., lih (15). Hal. 218*